

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang paling mendesak di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan kegagalan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain menghambat pertumbuhan fisik, stunting juga berdampak serius terhadap perkembangan kognitif dan daya saing sumber daya manusia di masa depan (Garenne et al., 2019). Oleh karena itu, penanganan stunting tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga strategis bagi masa depan pembangunan bangsa. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga berkorelasi erat dengan penurunan prestasi akademik dan produktivitas individu di masa dewasa. Ginting dan Pandiangan (2019) menegaskan bahwa anak yang mengalami stunting cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah dan kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Hal ini memperkuat urgensi penanganan stunting secara sistematis dan berkelanjutan sejak usia dini agar dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Penyebab stunting sendiri bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tidak hanya soal asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap layanan kesehatan, kualitas sanitasi lingkungan, tingkat pendidikan orang tua, serta faktor sosial-ekonomi lainnya. Nuramalia (2022) menyatakan bahwa rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa solusi stunting tidak bisa dijalankan melalui pendekatan sektoral semata. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sektor secara sinergis. Dalam studi kebijakan publik, pendekatan jaringan (policy network) menjadi kerangka yang relevan untuk menjawab tantangan ini. Klijn (2008) dalam teorinya "Networks as Perspective on Policy and Implementation" menekankan bahwa kebijakan tidak hanya dijalankan oleh aktor tunggal dalam jalur hierarkis, melainkan melalui interaksi antara banyak aktor yang saling bergantung, berbagi sumber daya, dan terikat oleh aturan bersama.

Jaringan implementasi kebijakan yang dimaksud bukan hanya struktur formal antar lembaga, tetapi mencakup interaksi informal, negosiasi, dan adaptasi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah. Dalam konteks stunting, jaringan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, hingga sanitasi dalam satu tujuan bersama mempercepat penurunan prevalensi stunting di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen kuat melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mendorong pendekatan konvergensi, yaitu integrasi program intervensi spesifik dan sensitif yang dijalankan oleh berbagai sektor. Pemerintah pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan penyedia sumber daya, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana utama di lapangan (Rahman dkk., 2023). Selain itu, aktor lain dalam jaringan turut memainkan peran strategis. Sektor swasta terlibat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF memberikan pedoman teknis dan advokasi, sementara masyarakat sipil menjadi pelaku utama dalam edukasi, advokasi, dan pengawasan sosial. Susunan ini mencerminkan praktik jaringan kebijakan yang menuntut komunikasi dan koordinasi intensif antarpihak, sebagaimana diteorikan oleh Klijn (2008).

Namun demikian, meskipun kebijakan nasional sudah cukup kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi seringkali tidak berjalan optimal. Data BKKBN tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 24,4%, yang artinya belum memenuhi ambang batas WHO sebesar 20% (Saputra dkk., 2022). Hal ini memperlihatkan adanya celah antara formulasi kebijakan dengan pelaksanaan di tingkat daerah, yang seharusnya menjadi ujung tombak perubahan. Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah setempat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya intervensi terintegrasi berbasis lima pilar, yaitu penguatan kepemimpinan, perubahan perilaku, ketahanan pangan, sistem informasi, dan inovasi pelayanan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mencoba menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam konteks lokal yang lebih adaptif.

Salah satu program unggulan di Takalar adalah “Anak Asuh Stunting”, yang melibatkan tokoh masyarakat dan institusi sebagai orang tua asuh anak-anak stunting. Melalui program ini, dukungan langsung terhadap kebutuhan gizi dan kesehatan diberikan secara partisipatif. Program ini mencerminkan bagaimana aktor-aktor dalam jaringan bisa memainkan peran yang saling melengkapi, sesuai dengan prinsip Klijn bahwa efektivitas jaringan bergantung pada keterhubungan dan kejelasan peran setiap aktor. Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Data terbaru menunjukkan adanya kenaikan angka stunting di Takalar dari 31,1% pada 2022 menjadi 35,4% pada 2023 (TribunTakalar.com, 2024; Rosdianah dkk., 2024). Fakta ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada perumusan kebijakan atau desain program, melainkan pada lemahnya koordinasi dan sinergi antar aktor dalam jaringan implementasi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, Agranoff dan McGuire (2003) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh adanya hubungan kerja sama yang stabil dan komunikasi yang terbuka dalam jaringan. Dalam konteks stunting, ini berarti adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata

kelola jaringan yang mampu mengintegrasikan sumber daya, mendorong koordinasi yang berkelanjutan, dan memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif di antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pengamatan awal, persoalan utama dalam jaringan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar tidak terletak pada ketiadaan regulasi atau program, tetapi pada lemahnya koordinasi horizontal dan vertikal antar aktor. Program sering berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka kolaborasi yang utuh, sehingga memunculkan tumpang tindih kegiatan, pemborosan sumber daya, dan penurunan efektivitas intervensi.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait studi jaringan implementasi kebijakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu dianggap relevan dan menjadi perbandingan yang penting untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Penelitian – penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian Hendrikus T. Gedeona (2013) menekankan pentingnya jaringan kebijakan dalam mewujudkan *good governance*, tetapi pembahasannya masih bersifat konseptual dan belum menyentuh realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini tidak membahas bagaimana tantangan nyata seperti lemahnya koordinasi antaraktor, konflik kepentingan, atau ketimpangan kekuasaan dalam jaringan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Kedua, penelitian Aji Primanto & Linda Puspitasari (2024) lebih banyak berfokus pada level kebijakan nasional, sehingga kurang menggambarkan kesenjangan implementatif yang terjadi di daerah. Padahal, penanganan stunting sangat bergantung pada pelibatan aktor lokal dan keberfungsian jaringan di tingkat daerah, yang merupakan titik krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan pusat.

Ketiga, penelitian Febby Febrian & Rahmadani Yusran (2021) menyoroti lemahnya koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang, yang hanya melibatkan sektor kesehatan tanpa pelibatan lintas sektor lainnya. Ini menunjukkan tidak berjalannya prinsip dasar dari jaringan kebijakan yang mengandalkan kolaborasi multipihak. Tidak adanya anggaran khusus dan regulasi pendukung semakin menunjukkan bahwa struktur jaringan belum terbentuk secara sistemik.

Keempat, penelitian Farhan Damara (2023) mengidentifikasi faktor penghambat seperti pernikahan dini dan kepatuhan administrasi pendatang, namun tidak mengelaborasi bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks jaringan aktor, atau bagaimana kebijakan direspons oleh aktor-aktor lokal yang seharusnya saling terhubung.

Melihat berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kebijakan penurunan stunting masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan belum secara mendalam membahas dinamika jaringan aktor dalam

implementasinya. Sebagian besar studi lebih menyoroti aspek normatif dan kebijakan di tingkat nasional tanpa menguraikan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat daerah secara konkret. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengupas bagaimana hubungan antaraktor terbentuk, bagaimana sumber daya dialokasikan dan dipertukarkan, serta bagaimana aturan formal dan informal memengaruhi proses implementasi kebijakan stunting di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang menekankan pada pendekatan jaringan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Klijn (2008). Pendekatan ini memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan sebagai hasil dari interaksi berbagai aktor yang saling bergantung, terikat dalam aturan, dan berbagi sumber daya. Dalam konteks kebijakan penurunan stunting, penting untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, OPD teknis, masyarakat, dan pihak lain berlangsung dalam jaringan yang kompleks, serta bagaimana dinamika kekuasaan, koordinasi, dan sumber daya memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana jaringan implementasi kebijakan penurunan stunting dibentuk, dijalankan, dan beradaptasi dalam konteks lokal di Kabupaten Takalar. Fokus kajian mencakup tiga elemen utama dalam teori jaringan Klijn (2008), yaitu ketergantungan antarpelaku (aktor), pola distribusi dan pemanfaatan sumber daya, serta aturan main yang mengikat proses interaksi dalam jaringan kebijakan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara empiris maupun konseptual dalam memperkuat tata kelola jaringan kebijakan penurunan stunting yang lebih terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.2 Tinjauan Teori

Menurut Klijn (2008) dalam buku *"Policy and Implementation Networks: Managing Complex Interactions,"* membahas bagaimana kebijakan publik dan implementasinya berlangsung dalam konteks jaringan yang kompleks. Jaringan ini melibatkan aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat yang saling bergantung, mencerminkan respons terhadap meningkatnya kompleksitas sosial, teknologi, dan hubungan horizontal di masyarakat modern. Tata kelola tradisional yang hierarkis dianggap kurang efektif, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi esensial. Namun, implementasi kebijakan dalam jaringan ini menghadapi tantangan seperti fragmentasi kekuasaan dan kebutuhan untuk mengelola interaksi antaraktor secara efektif. Dalam bab ini mengklasifikasikan penelitian jaringan ke dalam tiga tradisi utama:

1. Jaringan Kebijakan: Berfokus pada pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan, serta pengaruh aktor dan komunitas kebijakan terhadap hasil kebijakan.

2. Jaringan Pelayanan dan Implementasi: Menitikberatkan pada koordinasi antarorganisasi dalam menyediakan layanan publik secara terintegrasi, dengan ketergantungan pada mekanisme kerja sama.
3. Jaringan Tata Kelola: Berorientasi pada pengambilan keputusan kolektif untuk menyelesaikan masalah sosial, dengan fokus pada legitimasi, deliberasi, dan pengelolaan konflik nilai.

Menurut Klijn dan Teisman (2003), implementasi pelayanan publik dalam konteks pemerintahan modern tidak lagi bisa dipahami melalui pendekatan birokratis tradisional yang bersifat hierarkis dan linear. Sebaliknya, implementasi harus dilihat sebagai proses kompleks bukan sekadar menjalankan perintah dari atas, melainkan merupakan hasil dari negosiasi dan koordinasi yang berlangsung terus-menerus di antara para aktor tersebut.

Jaringan berperan sebagai alat untuk mengatasi tantangan kompleks dalam kebijakan, karena tidak ada aktor tunggal yang mampu mengelola masalah tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, berbagai pihak dari sektor yang berbeda bekerja sama dalam jaringan untuk menyelesaikan isu kebijakan yang lebih besar. (Klijn 2008). Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah, kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat sangat penting. Pemerintah perlu membangun jaringan yang efektif antar aktor tersebut untuk memastikan bahwa tujuan program atau kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Kerjasama ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program yang sedang berjalan (Sudirman dkk, 2022).

Dalam buku *Managing Networks in the Public Sector* oleh Klijn, Koppenjan, dan Termeer (1995), teori jaringan menjelaskan bahwa proses kebijakan publik berlangsung melalui interaksi antara berbagai aktor yang saling bergantung. Aktor-aktor ini berasal dari berbagai sektor, seperti pemerintah, swasta, dan organisasi lain, yang bekerja dalam jaringan berdasarkan hubungan jangka panjang, penggunaan sumber daya bersama, dan aturan yang disepakati, baik secara formal maupun informal. Teori ini menyoroti dua pendekatan utama dalam pengelolaan jaringan:

1. Manajemen Interaksi: Fokus pada pengaturan hubungan antaraktor untuk memanfaatkan peluang dan menyelesaikan konflik demi mencapai tujuan bersama.
2. Pengaturan Jaringan: Mengubah struktur jaringan, termasuk hubungan antaraktor, distribusi sumber daya, dan aturan, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Teori ini memberikan panduan untuk memahami dan mengelola kompleksitas kebijakan dengan mengutamakan kerja sama dan pendekatan strategis (Klijn et al., 1995). Teori jaringan berfokus pada pola hubungan yang menghubungkan berbagai anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, berdasarkan interaksi yang terjadi di antara mereka. Salah satu ciri utama pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menganalisis struktur

hubungan dari skala mikro hingga makro. Dengan demikian, aktor dalam teori jaringan dapat berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Teori jaringan dapat diterapkan pada berbagai tingkat aktivitas, seperti dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta program pelayanan publik, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini dicapai melalui pemanfaatan sumber daya bersama (*sharing resources*). Kolaborasi dalam penggunaan sumber daya ini hanya dapat ditemukan pada organisasi yang berbasis jaringan. Karakteristik jaringan inilah yang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan (Hidayat dkk, 2016).

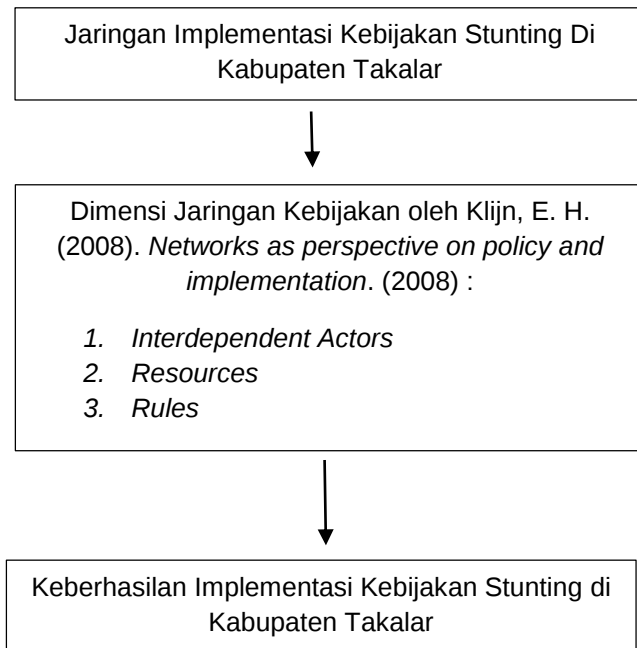
Menurut Erik Hans Klijin pada "*Chapter 5: policy and implementation networks: managing complex interactions*" (2008) jaringan implementasi kebijakan menekankan bahwa implementasi kebijakan terjadi dalam jaringan aktor yang saling bergantung, bukan dalam struktur hierarkis yang bersifat kaku. Implementasi kebijakan dalam jaringan melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, di mana masing-masing aktor memiliki sumber daya, kepentingan, serta persepsi yang berbeda terhadap kebijakan yang diterapkan. Klijin (2008) mengidentifikasi beberapa dimensi utama dalam jaringan implementasi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu :

1. Aktor yang Saling Bergantung (*Interdependent Actors*): "jaringan" mengacu pada sekumpulan aktor yang berbeda (bisa jadi organisasi pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dll.) yang berinteraksi untuk mencapai tujuan kebijakan. Kata kunci di sini adalah interaksi, yang menyiratkan bahwa aktor-aktor ini tidak bekerja dalam isolasi. Mereka perlu berkoordinasi, bernegosiasi, dan bekerja sama karena mereka saling membutuhkan untuk implementasi kebijakan yang efektif. Klijin kemungkinan akan menjelaskan bagaimana tidak ada satu aktor pun yang memiliki otoritas atau kapasitas penuh untuk mengimplementasikan kebijakan secara unilateral.
2. Sumber Daya (*Resources*): Saling ketergantungan ini seringkali didorong oleh kebutuhan akan sumber daya yang beragam. Aktor yang berbeda mengendalikan sumber daya yang berbeda pula. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki otoritas legal dan anggaran, organisasi swasta memiliki keahlian teknis dan kapasitas operasional, sementara organisasi masyarakat sipil memiliki legitimasi dan jangkauan ke akar rumput. Untuk implementasi kebijakan yang berhasil, aktor-aktor ini perlu mengakses dan menggabungkan sumber daya yang dikendalikan oleh aktor lain. Bab ini kemungkinan akan membahas bagaimana pertukaran dan mobilisasi sumber daya menjadi dinamika penting dalam jaringan kebijakan.

3. Aturan (*Rules*): Interaksi antar aktor dalam jaringan kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa. Mereka dibatasi dan difasilitasi oleh berbagai aturan. Aturan ini bisa berupa:
 - Aturan Formal: Peraturan perundang-undangan, prosedur birokrasi, dan kontrak yang menetapkan batasan dan panduan untuk tindakan aktor.
 - Aturan Informal: Norma, kebiasaan, praktik profesional, dan pemahaman bersama yang memengaruhi bagaimana aktor berinteraksi dan bernegosiasi.

Penelitian tentang implementasi kebijakan stunting sangat relevan dengan teori jaringan karena kebijakan ini melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki persepsi (*frame*) yang berbeda mengenai penyebab dan solusi stunting, yang menciptakan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Interaksi antaraktor ini sering kali melibatkan negosiasi dan kompromi yang mempengaruhi hasil kebijakan. Selain itu, interaksi yang terus-menerus membentuk struktur institusional yang mengatur pelaksanaan kebijakan, seperti prosedur dan aturan yang harus diikuti. Untuk itu, manajemen jaringan yang efektif sangat diperlukan agar koordinasi antaraktor berjalan lancar, dengan fokus pada fasilitasi komunikasi dan kolaborasi, bukan sekadar kontrol. Dengan pendekatan ini, teori jaringan memberikan wawasan penting tentang dinamika dan tantangan dalam implementasi kebijakan stunting. Pendekatan jaringan dalam implementasi kebijakan menekankan bahwa kebijakan melibatkan berbagai aktor yang saling bergantung namun tetap memiliki otonomi dalam strategi dan persepsinya. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Takalar, aktor seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, organisasi dan masyarakat memiliki peran berbeda dalam intervensi. Kompleksitas interaksi antar aktor ini mencerminkan konsep jaringan, di mana keberhasilan kebijakan bergantung pada koordinasi dan negosiasi yang efektif. Selain itu, pola kerja sama yang berulang membentuk aturan dan mekanisme kelembagaan yang mendukung kelangsungan program. Oleh karena itu, manajemen jaringan menjadi kunci dalam menyelaraskan kepentingan dan strategi aktor untuk memastikan implementasi kebijakan yang optimal dalam upaya menurunkan angka stunting di Takalar.

Gambar I. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar dengan mengacu pada dimensi jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Klijn (2008), yakni aktor yang saling bergantung (*interdependent actors*), sumber daya (*resources*), dan aturan (*rules*). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola hubungan dan ketergantungan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting; (2) mengevaluasi bentuk dan distribusi sumber daya yang digunakan dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut; serta (3) menganalisis aturan formal dan informal yang memengaruhi koordinasi dan kolaborasi antar aktor dalam jaringan kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana ketiga dimensi jaringan tersebut berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di tingkat lokal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis dan praktis yang signifikan. Dimana antara lain yaitu:

1. Akademis

Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan jaringan implementasi kebijakan, jaringan sosial, dan perubahan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa di wilayah lain atau dengan fokus yang berbeda.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Temuan mengenai kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program dan meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan dalam merancang kebijakan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan stunting, sekaligus mendorong advokasi untuk peningkatan anggaran, sumber daya manusia, dan dukungan politik yang lebih optimal bagi program-program terkait.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai dinamika jaringan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif pengalaman, pandangan, dan interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan di konteks sosial yang nyata (Creswell, 2014).

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bersifat alamiah, interpretatif, dan menekankan pada makna yang diberikan oleh partisipan terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, studi kasus dipandang tepat karena memberikan ruang untuk memahami secara kontekstual dan mendalam fenomena kebijakan stunting yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor serta tingkatan pemerintahan. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menelaah secara intensif dinamika hubungan, pola kolaborasi, serta tantangan koordinasi yang terjadi di dalam jaringan kebijakan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dianggap relevan karena stunting merupakan isu yang multidimensional, melibatkan faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan tata kelola kebijakan. Interaksi yang terjadi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, pendekatan ini dapat menggali dinamika jaringan kebijakan secara alami dan kontekstual. Pendekatan ini juga bersifat induktif, sehingga mampu mengungkap pola dan tema yang muncul dari data lapangan tanpa dibatasi oleh kerangka teori yang kaku, menghasilkan pemahaman yang lebih relevan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan (Creswell, 2014).

II.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai desain utamanya. Studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau menafsirkan suatu fenomena dalam konteks aslinya secara alami, tanpa campur tangan dari pihak luar. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam latar belakang, kondisi saat ini, serta interaksi dalam suatu unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, institusi, maupun masyarakat (Suryabrata, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai jaringan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, dan Masyarakat.

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. **Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar. Melalui observasi, peneliti melihat bagaimana koordinasi antar OPD, seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, dan Diskominfo berlangsung di lapangan. Peneliti mencatat interaksi, keterlibatan aktor, serta pelaksanaan program seperti posyandu dan rembuk stunting. Hasil pengamatan dituangkan dalam catatan lapangan untuk menangkap kondisi nyata dan mendukung analisis data secara kontekstual.

2. **Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara sebagai acuan, namun tetap memberikan kebebasan bagi informan dalam menjawab. Teknik ini diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar, seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, dan Diskominfo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait peran, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan program stunting, serta memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan sesuai arah pembicaraan.

3. **Analisis Dokumen**

Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Takalar, seperti Peraturan Bupati, SK TPPS, serta kegiatan OPD. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya peran penting koordinasi dan keterlibatan lintas sektor, sehingga analisis dokumen digunakan untuk menelusuri sejauh mana kebijakan tersebut dirancang, dipahami, dan dijalankan oleh para aktor terkait. Metode ini melengkapi data lapangan dengan memberikan gambaran tertulis tentang peran, tugas, dan tanggung jawab antarinstansi, serta mengidentifikasi kesenjangan antara rencana kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Praditia (2013), model analisis data interaktif mencakup tiga elemen utama :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan berbagai informasi yang relevan dengan data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses pengumpulan data di lapangan. Tahapan ini merupakan bagian dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, serta memperjelas data. Proses ini membantu menyaring informasi yang kurang penting, sehingga menghasilkan narasi yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mendukung penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, atau format serupa lainnya. Melalui penyajian ini, peneliti lebih mudah memahami permasalahan yang ada dan merancang langkah-langkah berikutnya sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi adalah langkah untuk memahami makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Pada tahap ini, informasi yang terkumpul diorganisasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil akurat, konsisten, dan mendukung tujuan serta pertanyaan penelitian. Hal ini juga mencakup pengujian ulang hasil temuan untuk memverifikasi keandalannya sebelum disampaikan sebagai bagian dari hasil akhir penelitian.

Ketiga elemen tersebut saling berhubungan secara erat dan harus diintegrasikan dalam analisis data kualitatif. Hubungan antar elemen ini perlu terus-menerus dibandingkan dan disesuaikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang valid dan relevan dengan penelitian.

II.3.4 Validitas dan Reliabilitas

- a. Validitas

Validitas data dalam penelitian kualitatif merujuk pada tingkat kecocokan antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti dalam laporannya. Creswell dan

Miller menjelaskan bahwa validitas didasarkan pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap akurat, baik dari perspektif peneliti, partisipan, maupun pembaca secara keseluruhan.

b. Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada keandalan atau ketepatan suatu instrumen atau alat ukur dalam mengevaluasi suatu objek. Jika alat tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur fenomena yang sama dan menghasilkan hasil yang konsisten, maka alat tersebut dianggap reliabel. Secara sederhana, reliabilitas dapat diartikan sebagai konsistensi suatu alat ukur. (Creswell, 2013)

Validitas dan reliabilitas adalah konsep penting dalam evaluasi instrumen atau metode penelitian, khususnya dalam konteks pendidikan dan pengajaran, seperti yang dijelaskan oleh Miller.